

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI

Firda Mutiara

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Firda_mutiara@ymail.com

ABSTRAK

FIRDA MUTIARA (B 11109 270), TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI , skripsi ini dibawah bimbingan Soekarno Aburaera selaku pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan Ongkos Naik haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan juga untuk mengetahui mekanisme dalam arisan haji dan tanggung jawab dari bandar arisan apabila ada yang melakukan wanprestasi serta bagaimana islam memandang pelaksanaan ibadah haji melalui mekanisme arisan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan tokoh-tokoh organisasi Islam di kota Makassar, akademisi, travel penyedia jasa pemberangkatan haji dan penulis juga mewawancarai pihak-pihak terkait seperti mereka yang pernah atau sementara mengikuti arisan tembak.

Untuk mengkaji permasalahan digunakan penelitian yuridis normatif-filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif. Penelitian adalah penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Penulis juga melakukan penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti mengenai perjanjian arisan haji. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada. Penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian arisan haji lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dibuat mekanisme yang memudahkan seseorang untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaannya secara hukum, perjanjian arisan haji ini memiliki banyak kelemahan. Misalnya dari sudut keadilan, karena peserta diwajibkan menanggung sendiri biaya haji jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Kemudian rentannya terjadi wanprestasi karena lamanya jangka waktu pelaksanaan arisan haji. Kemudian pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan dari kacamata Islam. Pelaksanaan ibadah haji tidak boleh memaksakan diri dalam pelaksanaannya. Ibadah haji ini hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki

kemampuan fisik dan harta yang cukup atau berlebih. Sehingga jika ia tidak memiliki kemampuan, tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 88%.¹ Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pendaftar pemberangkatan haji pun terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari lamanya antrian pemberangkatan haji yang terjadi, utamanya di Sulawesi Selatan, yakni 15 tahun.²

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan mampu dari segi finansial. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”³

Sebagai dasar keislaman seseorang, tidak sempurna agamanya jika belum menunaikan ibadah haji selama dia mampu menempuh jalannya. Allah SWT berfirman :

“dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”⁴

Dari penjelasan di atas, mempertegas kewajiban perintah menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Berangkat dari perintah kewajiban tersebut, setiap muslim pun berlomba-lomba agar dapat menunaikan ibadah haji. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mudah untuk

¹ Mylaboratorium.blogspot.com diakses pada 1 oktober 2012 pukul 15.00 WITA

² Kemenag.Go.Id. Data tahun 2012

³ Q.S Ali Imran 3:97

⁴ Q.S Al hajj 22:27

dicapai, utamanya terkait syarat fisik dan materi yang seringkali sangat memberatkan bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikannya. Besarnya biaya haji yang harus dikeluarkan membuat masyarakat menengah ke bawah kesulitan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini.

Di beberapa daerah di Indonesia, gelar haji menunjukkan strata sosial seseorang. Orang yang telah memiliki gelar haji dianggap sebagai orang yang berkelebihan secara materi dan mendapat penghormatan tertentu, dikarenakan bagi sebagian masyarakat ibadah haji membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Di tengah masalah kemampuan materi yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk berangkat haji, muncul suatu kebiasaan baru dalam masyarakat demi mencapai tujuan berhaji, misalnya menjual harta benda, membuka tabungan haji dan mengikuti arisan haji.

Di antara kebiasaan tersebut, Arisan Haji merupakan yang paling populer saat ini, hal ini disebabkan karena Arisan merupakan hal yang sudah sangat mengakar dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia, arisan telah menjadi gaya hidup bagi sekelompok orang tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.

Definisi Arisan yang dimaksud dalam Arisan Haji ini sama dengan dengan Arisan Pada Umumnya yaitu kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Yang membuat arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya ialah pada proses pelaksanaannya di mana dalam arisan biasa yang setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode arisan berikutnya yang akan diadakan. Arisan Haji hadir dengan konsep yang berbeda dimana tidak adanya pertemuan rutin seperti arisan pada umumnya. Selain itu Arisan haji dikhususkan untuk orang beragama Islam guna membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

PEMBAHASAN

Mekanisme Arisan Haji:

1. Mekanisme Undian

Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, para anggota Arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Setelah diketahui, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh anggota arisan cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekian orang anggota arisan, maka dilakukan undian untuk mengetahui siapa saja anggota arisan yang berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut.

Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya uang simpanan si pemenang undian tersebut belum mencapai BPIH yang ditetapkan pemerintah.

Selisih jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang tabungan yang disimpannya pada arisan, merupakan hutang (pinjaman) kepada para anggota arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunasi.

Selanjutnya pada tahun berikutnya atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dilakukan pula undian untuk memberangkatkan anggota berikutnya,

sampai secara berangsur-angsur seluruh anggota arisan diberangkatkan ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji

2. Mekanisme Undian yang disertai dengan pemberian jaminan

Mekanisme ini dalam pelaksanaannya secara garis besar sama dengan mekanisme undian yang telah diuraikan di atas. Namun yang membedakan adalah dalam mekanisme ini peserta yang mengikuti arisan diharuskan memberikan suatu jaminan, karena dana ibadah haji yang diperoleh dari arisan merupakan utang, sehingga pihak penyelenggara meminta suatu jaminan yang akan dikembalikan pada saat arisan telah selesai. Artinya, jaminan yang diberikan kepada pihak penyelenggara akan dikembalikan setelah seluruh peserta telah diberangkatkan menunaikan ibadah haji.

Dari hasil penelitian ditemukan, mekanisme inilah yang digunakan oleh pihak penyelenggara travel dengan mekanisme sebagai berikut: dalam suatu kelompok arisan haji yang memiliki jumlah anggota 70 orang. Dana Ongkos Naik Haji adalah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Setiap bulan para peserta membayar iuran minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Undian akan dilakukan setiap bulan pula ketika uang setoran perbulan telah dilunasi oleh seluruh peserta. Sehingga dalam setahun kelompok arisan ini mampu memberangkatkan 12 orang peserta. Yang berarti pelaksanaan arisan ini memakan waktu 5-6 tahun. Dalam pelaksanaan arisan ini para peserta memberikan jaminan yang pada umumnya memberikan sertifikat tanah.

3. Mekanisme Pembayaran Dana Ta'Awwun

Mekanisme ini untuk menentukan peserta yang akan berangkat tidak dengan sistem undian, melainkan adalah dengan menyetorkan dana *Ta'Awwun* atau dana tolong menolong yang tidak ditentukan jumlah besarnya. Hanya mengikuti dana ujah atau dana operasional sebagai standar minimal dana *Ta'Awwun*. Jumlah dana tolong-menolong yang dikeluarkan bergantung pada kerelaan peserta yang bersangkutan. Peserta yang paling banyak menyampaikan dana *Ta'Awwun*, dialah yang berhak diberangkatkan pada tahun itu.

Ongkos Naik Haji (ONH) = Rp. 30.000.000,-

80 peserta x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,-

Dana Ujrah (Operasional) = Rp. 5.500.000,-

Dana Ujrah digunakan untuk pelaksanaan pengajian, operasional, administrasi, konsumsi, dan sebagainya.

Dana Ujrah juga sekaligus sebagai batas minimal dana *Ta'awwun*.

Dana *Ta'awwun* dikurangi dana Ujrah menjadi kas dana *Ta'awwun* seluruh peserta.

Contoh Perhitungan Kas Dana Ta'awwun

Contoh ada 3 peserta yang mengikuti penyampaian Dana *Ta'awwun*:

Muhammad Afif Rp. 5.500.000.

Sri Rahayu Rp. 5.700.000

Suardi Rp. 6.000.000

Bapak Suardi sebagai orang yang akan menyetorkan dana *Ta'Awwun* terbanyak, berhak mendapatkan ONH Rp.30.000.000 dengan membayar dana *Ta'awwun* Rp. 6.000.000

Perhitungan Kas Dana *Ta'awwun* adalah sebagai berikut:

Dana Ta'awun Tertinggi – Dana Ujrah = Kas Dana Ta'wun

Rp. 6.000.000 – Rp.5.500.000 = Rp. 500.000

Jika Kas Ta'awwun sudah mencapai Rp.30.000.000, maka akan menambah 1 quota ONH lagi. Maka ada penyusutan untuk memberikan dana *wadiah* /titipan.

4. Mekanisme Pembayaran Pertama

Per- 5 tahunan

Iuran perbulan @ Rp. 750.000,-

Per- 4 tahunan

Iuran perbulan @ Rp. 1.000.000,-

Mekanisme pemabayaran ini memiliki ketentuan:

4 atau 5 tahunan berarti para peserta arisan akan diberangkatkan menunaikan ibadah hajinya setelah mengikuti arisan haji selama 4 atau 5 tahun dan dapat berangkat pada tahun yang sama. Apabila waktu habis masa arisannya ternyata waktu pendaftaran haji sudah ditutup oleh Depag, berarti peserta arisan akan diberangkatkan pada musim haji berikutnya.

Apabila nantinya peserta arisan ada yang mengundurkan diri sebelum masa undian waktu arisan selesai, maka seluruh dana peserta selama mengikuti arisan tersebut dapat dikembalikan utuh dan pencairan dana tersebut dilakukan setelah 3 (tiga) tahun berjalan.

5. Mekanisme Arisan Haji dengan perjanjian tertulis⁵

Banyak metode penawaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk menarik peserta arisan haji. Salah satunya adalah dengan mencantumkan brosur dan klausula penawaran melalui media internet. Salah satu bentuk penawaran yang ditemukan dengan pencantuman klausul.

Jika melihat lima mekanisme arisan haji yang dipaparkan di atas, ternyata terdapat kesamaan, yakni unsur ketidakadilan peserta yang mendapat giliran diperiode awal dan periode akhir tetap terjadi. Oleh karena pada prinsipnya lima mekanisme diatas tetap mewajibkan peserta yang mendapat giliran untuk menanggung sendiri selisih jumlah dana arisan dengan perubahan ONH atau BPIH yang akan terjadi. Perbedaananya hanya pada sistem pengundian atau penentuan orang yang akan mendapat giliran berangkat. Misalnya pada mekanisme pertama dan ketiga, penentuan peserta yang akan berangkat pada mekanisme pertama melalui pengundian. Sedangkan pada mekanisme ketiga penentuan peserta yang akan berangkat tergantung pada siapa yang menyumbangkan dana ta'awwun terbesar.

Pengaruh Perubahan ONH/BPIH Terhadap Sistem Arisan Haji

⁵ <http://KSU-syariahAssalam.blogspot.com>

Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tergantung pada nilai tukar dollar. Umumnya BPIH selalu naik di setiap tahun. Penetapan mengenai BPIH di rapatkan oleh Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama yang selanjutnya dilaporkan kepada presiden. Kemudian presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (KepPres) yang menjadi dasar perubahan BPIH tiap tahunnya.⁶

Dalam pelaksanaan arisan haji, waktu yang diperlukan biasanya memakan waktu 3-7 tahun. Jumlah setoran arisan disesuaikan dengan kemampuan para pesertanya. Jika arisan haji ini dilaksanakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, maka waktu yang diperlukan bisa lebih lama lagi. Sedangkan inflasi uang berbeda, nilai uang sekarang akan beda dengan nilai uang yang akan datang. Di sinilah kelemahannya, yang mendapat giliran berangkat di periode awal akan lebih diuntungkan daripada yang memperoleh di periode akhir, jika kita melihatnya secara konvensional.

Perubahan BPIH atau ONH tentu akan sangat berpengaruh dalam sistem arisan haji. Oleh karena uang yang harus disetor bisa saja berubah dan tidak lagi bergantung pada kemampuan para pesertanya. Pada tahun 2011, BPIH senilai Rp 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengalami kenaikan pada tahun 2012 senilai Rp 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah. Dalam kurun waktu satu tahun, BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).⁷

Tabel 1

Jumlah ONH atau BPIH embarkasi Makassar

Tahun	Peraturan Presiden	Jumlah ONH/BPIH (USD)
2008	PerPres No.53/2008	USD 3,517
2009	PerPres No.41/2009	USD 3.575

⁶ Hasil wawancara dengan H. Sarro Baddu, staff Haji dan Umroh Departemen Agama Kota Makassar, 15 Desember 2012

⁷ *Ibid*

2010	PerPres No.51/2010	USD 3,505
2011	PerPres No.51/2011	USD 3,795
2012	PerPres No.67/2012	USD 3,882

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun ONH atau BPIH selalu berubah setiap tahunnya. Perubahan penurunan hanya satu kali terjadi dalam kurun waktu lima tahun tersebut, yakni pada tahun 2010. Untuk perubahan penurunan ONH, para peserta tetap berkewajiban membayar sesuai yang disepakati sebelumnya. Jika terdapat dana lebih karena turunnya ONH atau BPIH, maka dapat menjadi kas dari suatu kelompok arisan untuk mengantisipasi perubahan kenaikan di tahun berikutnya. Hal ini berdasarkan berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa perubahan kenaikan lebih dominan terjadi daripada perubahan penurunan.

Dalam teorinya, suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain, tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pesertanya. Dalam hal ini kita mengenal asas mengikatnya kontrak tetap berlaku. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Sehingga dalam pelaksanaan arisan ini, aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disepakati sejak awal tetap harus dipatuhi dan mengikat setiap peserta arisan. Sistem arisan haji di mana objek arisan bukanlah sejumlah uang melainkan pemberangkatan ibadah haji, maka jumlah uang iuran yang disetorkan harusnya mengikuti perubahan ongkos naik haji. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak diberlakukan sehingga memiliki kekurangan dari sudut keadilan.

Pada hakikatnya dalam setiap perjanjian yang dibuat menganut asas *pacta sun servanda* atau asas mengikatnya kontrak. Namun pelaksanaan asas ini sulit diterapkan jika terjadi perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap kemampuan debitur untuk melaksanakan janjinya. Dalam perjanjian arisan haji, perubahan ONH yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan adanya peserta yang tidak sanggup menanggung sendiri jumlah selisih dana arisan yang ia dapatkan dengan jumlah kenaikan ONH. Juga unsur ketidakadilan peserta yang mendapatkan giliran diperiode akhir, yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di beberapa negara yang menganut sistem *common law*, perubahan keadaan karena perubahan nilai mata uang diberlakukan asas *rebus sic stantibus*⁸. *Rebus sic stantibus* atau lebih dikenal dengan istilah *clausula rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dimaksud. Klausul *rebus sic stantibus* sangat penting terutama untuk kontrak-kontrak dalam skala besar dan dalam jangka panjang, yang mana kondisi ekonomi, politik dan situasi sosial pada saat implementasi kontrak-kontrak semacam itu berubah secara drastis, radikal dan fundamental.⁹

Menurut Taryana Soenandar, dalam praktek, perubahan fundamental keseimbangan kontrak dapat tercermin dalam 2 (dua) cara yang berbeda tetapi saling berkaitan. *Pertama*, perubahan itu ditandai dengan adanya kenaikan substansial dari ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh salah satu pihak pada waktu pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, dan pihak tersebut merupakan satu-satunya pihak yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. *Kedua*,

⁸ Istilah *Rebus sic stantibus* sendiri berasal dari suatu kalimat bahasa latin yaitu *contractus qui habent tractum succesivum et deperitiam de future rebus sic stantibus intelligentur* yang dapat diterjemahkan sebagai “Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama”

⁹ Faisal Akbaruddin Taqwa, *rebus sic stantibus* dalam khazanah hukum kontrak. Diakses pada 9 Januari 2013 pukul 13.00 WITA

terjadinya penurunan yang substansial dari nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak, termasuk apabila pelaksanaan kontrak itu tidak lagi memiliki nilai sama sekali bagi pihak yang menerimanya.¹⁰

Jika kita kaitkan dengan arisan haji, kesulitan itu meliputi selisih perubahan ONH yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga berpengaruh terhadap tanggungan pribadi dari peserta yang mendapat giliran di tahun-tahun berikutnya yang menjadi lebih besar jumlahnya. Kemudian dana yang diperoleh dari arisan menjadi lebih kecil dikarenakan perubahan kenaikan ONH. Jika asas *rebus sic stantibus* ini diterapkan dalam perjanjian arisan haji, maka dapat dilakukan pembaharuan atau negosiasi kembali mengenai iuran arisan yang akan disetor pada tahun berikutnya.

Di Indonesia sendiri berlaku yurisprudensi Mahkamah Agung No.112.K/Sip/1963, No.74 K/Sip/1969, No.380 K/Sip/1972, dinyatakan bahwa bilamana terjadi perubahan nilai mata uang, risikonya akan ditanggung bersama sama-rata, setengah-setengah antara debitur dan kreditur. Sehingga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan ini ialah para peserta sepakat untuk menaikkan iuran arisan setiap tahunnya. Sehingga walaupun terjadi kenaikan ONH atau BPIH, setidaknya selisih yang ditanggung oleh peserta di tahun berikutnya tidak terlalu jauh. Misalnya setelah musim haji tahun ini lewat dan mempersiapkan peserta yang akan berangkat tahun depan, iuran dinaikkan 5%-10% atau sesuai kesepakatan para peserta arisan dalam suatu kelompok arisan tertentu. Atau para peserta akan menanggung secara bersama sama-rata selisih dana arisan dan kenaikan ONH atau BPIH.

Pada intinya dalam praktik, perubahan ONH atau BPIH tidak mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Karena perubahan ONH menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan. Serta berdasarkan beberapa mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana terdapat lima mekanisme arisan haji, pada hakikatnya jika terjadi perubahan ONH maka konsekuensinya tetap sama. Dalam artian tidak merubah hak dan kewajiban dari peserta karena

¹⁰ *Ibid*

dari lima mekanisme tersebut, tetap memberikan tanggungan kepada peserta yang mendapat giliran untuk menanggung sendiri selisih perubahan ONH. Hanya saja hal ini mencederai nilai keadilan terhadap peserta lain yang belum mendapat giliran. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi perubahan ONH, semua peserta ikut bersama-sama menanggung perubahan tersebut.

Hak dan kewajiban peserta jika terjadi perubahan ONH atau BPIH ialah sebagai berikut. Hak peserta ialah tetap sama yakni berangkat haji, walaupun terjadi perubahan ONH atau BPIH. Sedang kewajibannya ialah:

- a. Tetap melunasi pembayaran iuran yang tersisa;
- b. Ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH.

Berdasarkan kewajiban point kedua dari peserta, maka lahirlah tanggung jawab baru bagi pihak penyelenggara atau pihak bandar. Yakni mengatur dan menaikkan pembayaran iuran secara proposional, dalam artian perubahan dibagi rata secara adil. Bandar tidak boleh seenaknya menaikkan iuran karena dapat menimbulkan sengketa baru.

Jika salah satu pihak merasa keberatan dengan perubahan yang terjadi karena ONH atau BPIH semakin mahal, atau tidak mampu membayarkan perubahan yang ditetapkan maka dapat dikategorikan wanprestasi. Karena telah disepakati sebelumnya bahwa jika terjadi perubahan, maka akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh peserta baik yang telah mendapat giliran berangkat haji ataupun yang belum. Namun sebelumnya dapat dinegosiasikan jika yang bersangkutan merasa keberatan dengan kenaikan tersebut. Disinilah letak peran dari penyelenggara atau bandar, bagaimana ia mengatur kenaikan pembayaran iuran yang diakibatkan kenaikan ONH, ditentukan secara adil dan proposional sesuai kemampuan dari peserta. Perubahan iuran harus mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta karena suatu perjanjian tidak boleh diubah tanpa ada kesepakatan para pihak.

Tanggung Jawab Penyelenggara Haji (Bandar) Dengan Sistem Arisan

Pembahasan yang kedua akan menguraikan tanggung jawab dari bandar apabila salah seorang atau beberapa peserta arisan melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa:¹¹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi salah satu peserta dalam arisan merupakan kelalaian untuk memenuhi kewajiban, misalnya pembayaran iuran. Dalam sistem arisan yang berdasarkan kesepakatan tanpa perjanjian tertulis, sangat sulit untuk menentukan suatu wanprestasi, peserta yang misalnya tidak mau lagi menyetor uang, tunduk di bawah perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian tidak tertulis. Akta autentik dalam bentuk perjanjian tertulis sangat dibutuhkan dan penting untuk menguraikan segala hak dan kewajiban seluruh peserta arisan.

Berikut akan diuraikan hak dan tanggung jawab bandar atau penyelenggara arisan haji. Hak dan kewajiban bandar ialah sebagai berikut. Hak dari bandar ialah memperoleh upah (*fee*) dari jerih payahnya mengatur dan mengorganisir dana suatu kelompok arisan yang diselenggarakannya. Kewajiban bandar ialah:

1. Melakukan penagihan tiap bulannya
2. Mengumpulkan dan menyimpan dana arisan
3. Melakukan pengundian sesuai waktu yang disepakati
4. Mendaftarkan haji peserta yang mendapat giliran
5. Menetapkan sanksi kepada peserta yang melakukan wanprestasi.

Dari paparan diatas, bandar atau pihak penyelenggara bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya karena ia memperoleh upah dari pelaksanaan kewajibannya tersebut.

¹¹ Ahmadi Miru, *Loc.Cit*, Hal 74

Perjanjian arisan yang merupakan perjanjian tidak tertulis, dapat menimbulkan masalah nantinya jika di kemudian hari terdapat peserta yang lalai dalam memenuhi prestasinya sedangkan di saat yang sama peserta yang lainnya merasa dirugikan karena telah menunaikan kewajiban, namun belum mendapatkan haknya. Dalam arisan haji, dana yang dikumpulkan tidaklah sedikit. Pengundian arisan akan dilaksanakan jika uang arisan telah terkumpul dan mencukupi BPIH satu orang atau lebih peserta.

Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa walaupun perjanjian arisan haji ini tidak tertulis, pada dasarnya perjanjian itu mengandung asas *pacta sunt servanda* atau mengikatnya kontrak. Seluruh peserta wajib menaati segala peraturan yang telah disepakati sebelumnya.

Hasniati, salah satu peserta arisan haji, mengungkapkan bahwa wanprestasi yang sering dilakukan oleh para peserta adalah terlambatnya memenuhi prestasi. Yakni terlambatnya peserta melakukan pembayaran iuran. Biasanya pembayaran dilakukan dalam pertemuan pengajian para peserta dikelompokkan arisannya. Pada pertemuan itulah, pihak penyelenggara akan menagih seluruh peserta untuk membayar iuran perbulan arisan haji, serta mengundi jika pengundian dilakukan perbulan. Pada pertemuan tersebut, tidak jarang ada beberapa peserta yang tidak hadir dan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Pada arisan yang dilakukan oleh kelompok Hasniati, pihak penyelenggara akan menanggung terlebih dahulu iuran dari peserta tersebut. Tidak ada batasan waktu untuk pengenaan sanksi terhadap peserta yang terlambat memenuhi prestasi. Oleh karena arisan haji ini dilaksanakan atas dasar kepercayaan dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang telah diketahui kredibilitasnya. Sehingga jika salah satu peserta terlambat memenuhi prestasi, maka akan dikomunikasikan oleh pihak penyelenggara.

Biasanya seorang peserta menunggu sekitar 2 hingga 3 bulan. Jika dalam kurun waktu tersebut, pihak penyelenggara masih akan menanggung terlebih dahulu. Jika lewat dari itu dan peserta menyatakan tidak mampu lagi untuk ikut dalam arisan tersebut, maka peserta tersebut dikeluarkan dengan tanpa pengembalian uang yang telah ia bayarkan sebelumnya. Namun jika peserta yang

terlambat memenuhi prestasi tersebut dan menunjukkan suatu itikad tidak baik, misalnya tidak dapat dihubungi dan diminta konfrmasinya, maka dapat dituntut secara hukum.

Dalam praktiknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian. Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dilayangkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua).¹²

Hal yang harus diperhatikan dalam penuntutan wanprestasi ini adalah pihak yang akan dituntut. Pihak penyelenggara juga bisa ikut menjadi tergugat jika ia tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk menagih peserta yang wanprestasi. Jadi para peserta (kreditur) yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak penyelenggara dan peserta yang melakukan wanprestasi secara bersamaan. Namun jika pihak penyelenggara telah melakukan usaha yang maksimal untuk melakukan tugasnya menagih kepada seluruh peserta, maka peserta wanprestasi saja yang dapat dituntut. Pihak penyelenggara atau bandar ikut menjadi penggugat bersama peserta lain yang dirugikan.

Kemungkinan yang dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, dapat dibagi menjadi empat:¹³

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji

Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat ibadah haji dari segi fisik dan materil, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berhaji berarti

¹² <http://rizafajaranggraeni.blogspot.com/2012/04/review-jurnal-hukum-perjanjian.html>

¹³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* Hal 75

berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat tersebut ada lima:¹⁴

1. Islam

Bagi yang hendak melaksanakan haji haruslah seorang Muslim, bukan saja karena ibadah haji adalah puncak rukun Islam, tetapi karena disanalah hendaknya nampak jelas penyerahan diri seorang manusia kepada Allah SWT.

2. Berakal

Berakal juga syarat sah dan wajibnya haji, maka tidak akan sah dan tidak diwajibkan atas orang gila, ayun, mabuk dan semisalnya ibadah hajinya sampai kembali akalnya. Karena orang yang tidak berakal tidak akan melakukan ibadahnya dengan niatnya dan tidak akan melakukan ibadah dengan benar.

3. *Baligh*

Baligh adalah syarat wajib, anak yang belum *baligh* tidak berkewajiban melakukan ibadah haji, karena Allah hanya membebaskan kewajiban bagi hamba-Nya yang telah *baligh*, hanya saja apabila dia melakukannya tetap sah hajinya. Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban hajinya. Bila menginjak *baligh* dan memenuhi syarat, tetap berkewajiban melakukan ibadah haji lagi.

4. Merdeka

Merdeka artinya bukan budak. Ini juga merupakan syarat wajib. Budak tidak diwajibkan haji sampai merdeka. Namun apabila mengerjakannya pada saat masih budak hajinya sah tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Maka apabila dia kemudian merdeka tetap berkewajiban melakukan haji lagi.

5. Mampu

Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran 3:97

الْعَالَمِينَ عَنْ غَنِيٍّ اللَّهُ فَإِنَّ كَفَرَ وَمَنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ إِلَّا اسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَى وَلَلَّهِ

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu”

¹⁴ Quraish Shihab, *Haji dan Umroh*, Lentera Hati, Jakarta:2012, Hal 218

Mampu yang dimaksudkan disini adalah :

1. Mampu fisik, kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji. Pada masa ini, persyaratan fisik makin ditekankan karena jumlah jemaah haji yang sudah demikian banyak. Tidaklah wajib bagi mereka yang sangat tua dan sakit yang berat untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, diluar kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.
3. Kemampuan yang lain adalah berkaitan dengan keamanan dalam perjalanan, tempat yang dituju, serta tempat dan waktu pelaksanaan ibadah hingga kembali menemui keluarga. Keamanan keluarga yang ditinggal pun, menjadi pertimbangan, jangan sampai karena anda tinggalkan mereka menderita.

Mampu atau *istita'ah* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara makna *istita'ah* bagi orang yang hendak pergi haji adalah kemampuan dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan keperluan pada saat haji, juga untuk keluarga yang ditinggal. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.

Mampu inilah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam tafsirannya. Apakah mampu menyicil juga dapat dikatakan mampu? Bukan hal yang mustahil beberapa kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu membayar lunas biaya ibadah haji secara kontan, dilakukan dengan cara menyicil. Juga kalangan masyarakat menengah ke atas yang tidak memiliki uang secara tunai, melainkan aset berupa rumah, tanah, saham, emas, dan lain sebagainya.

Arisan haji ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Arisan haji menjadi pembicaraan pro dan kontra terhadap keabsahannya. Ada dua pendapat mengenai pelaksanaan

arisan haji ini, yakni pendapat yang menilai tidak adanya masalah karena tidak adanya dalil yang melarangnya, dan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta pendapat yang menilai tidak sahnyalah haji dengan cara arisan karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Adanya unsur utang, perjudian, mengundi nasib, dan kezaliman pada anggota arisan yang mendapat jatah atau giliran yang terakhir dan kenaikan setoran arisan ketika pada gilirannya terjadi kenaikan ONH. Hal inilah yang menjadi fokus penulis dalam pembahasan ketiga ini, yakni pandangan Islam dalam pelaksanaan arisan haji.

Arisan merupakan praktek sosial ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk *urf* atau tradisi masyarakat yang menjadi adat kebiasaan. *Urf* yang baik dan bermanfaat dapat dijadikan aturan atau hukum. Arisan secara umum termasuk *muamalat* yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan sunnah secara langsung. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan arisan ini tidak menjadi haram. Arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dalam menghimpun dana dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para peserta arisan.¹⁵

Dalam menentukan ketentuan-ketentuan ini menurut KH. Jayatun¹⁶ perlu dilihat yang pertama adalah apakah mengandung unsur *riba*¹⁷ atau tidak, jika mengandung *riba* maka arisan tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika para peserta telah rela sama rela dengan ketentuan iuran yang dibayarkan, maka hal itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, harus ada penanggung atau jaminan yang diberikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika kelak misalnya peserta yang bersangkutan telah mendapatkan arisan meninggal dunia. Sehingga diharuskan ada penanggung yang akan melanjutkan pembayaran iurannya atau

¹⁵ <http://hukum-arisan-dalam-islam//facebook.htm>

¹⁶ Hasil wawancara dengan KH. Jayatun, *Op. Cit*

¹⁷ Secara etimologis *riba* berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminologis fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.

berupa jaminan, karena merupakan utang yang wajib dilunasi. Segala bentuk ketentuan atau aturan haruslah jelas.

Sedangkan menurut H. Muammar¹⁸, arisan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *maisir*. *Maisir* dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Perjudian apapun bentuknya dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas yang mengandung unsur *maisir* atau perjudian. Sebagaimana firmanNya Q.S Al-maidah 5:90;

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Namun karena pada dasarnya pelaksanaan arisan haji sifatnya adalah *ta'awwun* atau tolong menolong, maka H. Muammar menganggap arisan haji ini diperbolehkan. Tolong menolong merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firmanNya:

“bertolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”¹⁹

Berkaitan dengan objek ibadah haji atau arisan haji, KH. Jayatun memaparkan dua pendapat para ulama yang berbeda tentang pelaksanaannya. Pendapat pertama dengan tegas menyatakan bahwa belum wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji jika *istita'ah* nya tidak terpenuhi. Dalam arti pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana arisan, dianggap belum *istita'ah* atau mampu. Ulama yang berpendapat melaksanakan ibadah haji dengan sistem arisan ialah belum mampu, menganggap bahwa dalam pelaksanaan arisan haji ini unsur *gharar* terletak pada ketidakjelasan harga, karena ONH atau BPIH yang selalu mengalami kenaikan. Sehingga iuran arisan bisa saja berubah

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dr. H. Muammar bakry, LC. MA, *Op.Cit*

¹⁹ Q.S Al-Maidah 5:2

mengikuti perubahan ONH. Kemudian mengenai ketidakjelasan waktu penyerahan, dimana sistem arisan haji dengan mekanisme pengundian tidak memberikan kepastian kapan seorang peserta mendapatkan giliran. Pelaksanaan ibadah haji dengan sistem arisan juga menimbulkan kesan memaksakan diri. Sedangkan dalam pelaksanaan, tidak boleh memaksakan diri.

Pendapat lain mengatakan bahwa arisan haji diperbolehkan selama pengaturan yang jelas dan halal, serta adanya jaminan (yang halal) dari peserta yang mengikuti arisan haji ini. Aturan dalam sistem arisan tersebut harus dibuat dan dirundingkan secara bersama dan tidak boleh mengandung unsur *riba*, judi dan *gharar*. Mengenai anggapan dana yang diperoleh dari arisan adalah suatu utang, pendapat ini mengungkapkan bahwa menggunakan dana utang untuk melaksanakan ibadah haji diperbolehkan jika terhindar dari unsur *riba* dan *gharar*. Misalnya meminjam uang dari bank muamalah, yang telah memperhatikan unsur *riba* dan *gharar*, untuk dipergunakan membayar biaya perjalanan ibadah haji diperbolehkan dengan syarat adanya suatu jaminan atas utang tersebut. Jaminan tersebut menjamin pelunasan utang yang dipergunakan untuk biaya ibadah haji. Jaminan yang diberikan telah mendapat persetujuan dari anggota keluarga. KH.Jayatun menjelaskan bahwa pada prinsipnya utang dengan cara yang telah dijelaskan di atas dengan dana yang diperoleh dari arisan adalah sama.

Pergi haji adalah perjuangan yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan perbekalan yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan baginya mencapai derajat haji yang mabrur. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan. Mampu disini menurut Arfin Hamid²⁰, harus diartikan mampu secara real, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti mengutang untuk pelaksanaan ibadah haji atau dengan mengikuti sistem arisan haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.

²⁰ Hasil wawancara dengan Arfin Hamid, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tanggal 8 Januari 2012

Namun tetap saja banyak para ulama yang berselisih pendapat tentang tafsiran mampu ini.

A. Kelompok yang melarang haji dengan utang:²¹

1. Nashr Farid Washil :

ولكن الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق لمصر رفض تلك الفتوي ، واعتبرها مخالفة للنص القرآني {حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً} ، وأشار إلى أن الحج فريضة عينية علي كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متي تحققت جميع شروطها التي منها الاستطاعة المالية أو البدنية وأكد الدكتور واصل أن الإسلام حث علي أداء هذا الركن متي توفرت الاستطاعة والتي عرفها الفقهاء أن يكون المسلم مستطيعاً ببذنه واجداً من المال ما يبلغه الحج فضلاً علي نفقته ونفقة من يعول ومن هنا فلا حاجة لمن يحج بنظام التقسيط في أن يغالي في الحج الذي سقط عنه بموجب حكم إلهي يتلزم الاستطاعة ، مشيراً إلى أن الحاج يمكن أن يتوفي قبل سداد الدين الذي عليه ولهذا لا يجوز الحج بالتقسيط.

Nashr Farid Washil (Mantan Mufti Negara Mesir) menolak fatwa yang memperbolehkan Haji dengan utang, dan menganggapnya bertentangan dengan QS Ali Imran 3:97, Ayat ini memberi isyarat muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, diantaranya kemampuan harta dan fisik. Nashr Farid Washil menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh dimana seorang muslim dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang menghantarkan pergi haji, baik biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sini tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ilahi haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. Ia memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang dicicil.

فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل :يقول الله تعالى: (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: 97) من هذه الآية يَتَضَحَّى أَن مِن شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ الْاسْتَطَاعَةُ، وهي تشمل

²¹ Abu Malik Kamal. *Shaih Fiqh Sunnah*. Pustaka at-Tazkia.Jakarta. Hal. 225

الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن ملك زادًا وراحلة وتوافرت فيه باقي شروط وجوب الحج وجب عليه أن يحج لتحقيق الاستطاعة، ومن لم يجد زادًا ولا راحلة فلا حج عليه.

Syeikh Nashr Farid Washil menyatakan QS. Ali Imran 3:97 menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah kemampuan (*istitha'ah*), dan ini mencakup kemampuan fisik (*istitha'ah al-badaniyah*) dan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*). Barangsiapa memiliki kelebihan bekal (*zad*), atau kendaraan (*rahilah*) serta terpenuhi syarat wajib haji lainnya, maka wajib baginya untuk 'bersiap-siap' melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan kemampuan. Jika dia tidak mendapatkan bekal atau kendaraan, maka tidak wajib haji baginya.

Beberapa ulama menentang argumentasi Syeikh Nashr Farid dengan mengatakan bahwa argumentasi ulama yang melarang haji dengan utang tidak relevan, karena kemampuan adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Sehingga ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada *nash* yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta, baik dengan cara berutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa'I :

ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدي الحج؛ بل الأولى له ألا يستدين، ولكن لو فعل وحج بالاستدانة – بالنقسيط – صح حجه – إن شاء الله – .

Syeikh Khalid Ar-Rifa'I menyatakan bahwa:

“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan utang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya, Insya Allah.”

2. Syeikh Ibn Utsaimin :

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذا الأمر؛ فأجاب: “الذي أراه أنه لا يفعل؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحج؟! فلا أرى أن يستدين للحج؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه ديناً لا يدرى هل يقضيه أو لا؟ ربما يموت ولا يقضيه، ويبقى في ذمته؟” (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)، والله أعلم.

Menurut Syeikh Ibn Utsaimin, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Syeikh Ibn Utsaimin menyarankan untuk tidak berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima *rukhsah* (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak. Bahkan jika ia meninggal dunia dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.”

Syeikh Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa :

Telah bertanya seseorang : “ketika datang bulan Dzulhijjah saya ingin ziyarah ke baitullah, akan tetapi gaji saya baru akan keluar sepekan lagi, sedangkan saya tidak memiliki uang kecuali kebutuhan sampai sebulan, tetapi teman-teman dikantor memaksa saya untuk ikut dimana kita tidak bisa menjamin hidup sampai kapan. Maka salah seorang dari mereka meminjamkan uang kepada saya untuk keperluan haji.”

Syeikh Abdullah bin Baz menjawab bahwa apabila pemilik hutang mengizinkan orang yang berhutang maka hajinya tetap sah, dan memberimu modal dengan kerelaan, dan kamu pun dapat pergi haji dan setelah kembali pada bulan yang sama mengembalikan uangnya.

Kelompok yang melarang ibadah haji dengan berhutang berargumentasi bahwa berhutang atau mengambil kredit untuk haji atau dengan dana yang diperoleh dari arisan haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Ini menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil mereka adalah hadits Imam Al Baihaqi, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melarang orang pergi haji dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Aufa *Radhiallahu ‘Anhu*, ia berkata :

سألته عن الرجل لم يحج ، أيستقرض للحج ؟ قال : « لا »

“Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia boleh berhutang saja untuk pergi haji?” Beliau bersabda: “Tidak.”

Imam Asy Syafi’i memberi komentar hadits ini sebagai berikut :

ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل

“Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya.”

Namun demikian, sebagian ulama tetap menilai haji dengan utang adalah sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum punya kemampuan (*istitha’ah*), bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, karena Beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Tatkala dia berutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

B. Kelompok Yang Membolehkan pergi haji dengan utang sebagai berikut:²²

1. Fatwa Lajnah Daimah dan Fatwa Syeikh Bin Baz :

يجوز للإنسان أن يقترض ليتمكن من الحج ، إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء ، كما لو كان موظفاً وله راتب ، ويعلم أن راتبه يكفيه لقضاء الدين ، أو كان صاحب تجارة ونحو ذلك .

Diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika ia yakin/percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayarnya, seperti seorang pegawai yang punya *fixed income* (pendapatan perbulan) dan ia mengetahui dengan gaji yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang, atau jika ia seorang pedagang dan semisalnya.

2. Penulis Kitab Mawahib Al-Jalil :

قال في “مواهب الجليل” (531/2) : “ وفي منسك ابن جماعة الكبير : ” وإن اقترض للحج ما لا حلالاً في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به ” انتهى . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله (انظر : ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (41/11) ، ” فتاوى الشيخ ابن باز ” (393/16))

²² *Ibid*

Dalam kitab Mawahib Al-Jalil (jilid 2/hal. 531) : dalam kitab Mansak – Karya Ibn Jama'ah Al-Kabir: Jika berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia membayar hutangnya, dan pemberi hutang rela (ridha) dengannya, maka hal itu tidak mengapa.

3. Syeikh Ibn Baz :

لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق.

Tidak ada masalah, jika orang yang diberi tanggung jawab (pemberi hutang) memberi kelongaran (ijin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk pergi haji, jika yang bersangkutan mampu untuk membayarnya. Dan Allah Sang Pemberi Taufiq.

4. Ustadz Abdul Fatah Idris :

الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي أفتى بأن الحج بالتقسيط مباح شرعاً؛ لأن ذهاب الشخص للحج بهذا المال لم يرد فيه نهى، ولأنه سيقوم بتسديد هذا المال، وهذا وفقاً لمذهب من يرى أن الاستطاعة بالمال والنفس تتحقق حتى ولو كان هذا المال مقترضاً من الغير، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، مؤكداً أن الحج الذي يتم بهذا المال صحيح ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام Ustadz Abdul Fatah Idris – Profesor Perbandingan Fiqh (Ustadz Fiqh Muqaran) di Universitas Al-Azhar, beliau menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan madzhab yang berpendapat bahwa kemampuan (istitha'ah) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat madzhab syafi'i dan madzhab dhohiri, yang menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (shohih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.

5. Markaz Fatwa :

وحول حكم الحج بالتقسيط أكد مركز الفتوى أن المطلوب من مريد الحج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبروراً وذنبه مغفوراً، وفي الحديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم، فإذا تقرر هذا فإن حكم الحج بالتقسيط ينبنى على سلامة المال من المحذور الشرعي، فإن سلم من ذلك

فيجوز أن يستعمل في نفقات الحج وغيرها، والمحذور الشرعي في التقسيط هو اشتماله على فائدة ربوية أو غرامة تأخير، فغرامة التأخير هذه ربا محرم.

Seputar hukum ibadah haji dengan hutang yang dicicil, Markaz Fatwa menekankan bahwa hal yang dituntut dari mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah berhaji dengan harta yang halal dan bebas dari harta *syubhat*, hingga hajinya menjadi haji yang mabrur dan dosanya diampuni, seperti dalam sebuah hadis : “Sesungguhnya Allah Dzat Yang Baik dan Ia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik (thoyib)” (HR Muslim). Dengan demikian hal paling penting yang harus diperhatikan terkait dengan hukum melaksanakan ibadah haji dengan cara hutang yang dicicil adalah hartanya terbebas dari hal-hal yang dilarang agama (*salamah al-mal min al-mahdzur*). Jika harta yang akan digunakan untuk ibadah haji terbebas dari sesuatu yang dilarang agama, maka diperbolehkan digunakan untuk biaya ibadah haji dan hal lainnya. Hal yang dilarang dari hutang yang dicicil adalah adanya riba atau denda tambahan karena mengakhirkan pembayaran (riba atas hutang). Maka denda tambahan karena mengakhirkan pembayaran adalah riba yang diharamkan.

6. Hudzaifah Muhammad Al-Musayar :

قال دكتور حذيفة محمد المسير الأستاذ في كليه أصول الدين : الحج يجب علي المسلم فوراً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا “. وبالتالي إذا ملك المسلم الأسباب التي توصله إلي أداء الفريضة دون اثر علي من يتبعه ويعولهم أصبح الأداء واجبا من غير نظر لكونه بالتقسيط أم بغير ذلك طالما أن المال الذي يدفعه الشخص حلالاً ومن كسب مشروع .

Hudzaifah Muhammad Al-Musayar – Profesor di Kuliyah ushuludin : Ibadah haji wajib bagi setiap muslim untuk segera dilaksanakan, berdasarkan sabda Rasul SAW : “Wahai manusia telah diwajibkan bagi kalian ibadah haji, maka beribadah hajilah “. Berikutnya jika seorang muslim memiliki sebab-sebab yang menghantarkannya untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang yang mengikuti dan menjadi tanggung jawabnya, maka jadilah menunaikan sebagai kewajiban tanpa melihat apakah dana haji berasal dari hutang dengan mencicil atau lainnya selama harta yang digunakan berasal dari hal yang halal dan usaha yang di syariatkan.

7. Abdullah Faqih :

وإن أراد الحج -مع ذلك- لزمه إعلام الدائنين واستئذانهم، فإن لم يفعل صح حجه مع إثمه في تأخير سداد دينه.

وإن كان ما عنده من المال يفي بقضاء الدين ونفقة الحج فالحج واجب عليه، وسداد الدين واجب كذلك. هذا في الديون الحالية، أما الديون المؤجلة التي لم يحن وقتها فقضاؤها ليس واجباً قبل ذلك، ولا حرج في الحج مع وجودها، ويجوز للإنسان أن يقترض ليحج، ويرجى له الإعانة من الله تعالى

Abdullah Faqih menyatakan bahwa seseorang yang hendak beribadah haji, berkewajiban untuk memberitahu dan meminta izin dari orang-orang yang memberinya hutang. Jika ia tidak melakukannya, maka ibadah hajinya tetap sah walau ia berdosa karena mengakhirkan pembayaran hutang.

Namun jika ia memiliki uang untuk membayar hutang dan biaya haji maka ibadah haji menjadi wajib baginya dan membayar hutang juga wajib baginya. Ini untuk hutang yang segera dibayar/kontan, namun jika hutang yang ditangguhkan pembayarannya serta belum jatuh temponya, maka membayar hutang bukan merupakan kewajiban sebelum itu (pergi haji). Dan tidak berdosa (*laa haraj*) beribadah haji dengan adanya hutang. Boleh bagi seseorang untuk berhutang guna menunaikan ibadah haji dan semoga Allah SWT menolongnya.

Jika seseorang merasa mampu melunasi hutangnya dengan cara mengangsur dan dia memiliki sumber pendapatan tetap/barang senilai hutangnya, maka boleh melaksanakan haji dengan dana pinjaman/hutang, namun apabila hal itu menambah kesulitan baginya, maka sebaiknya jangan dipaksakan berhaji dengan menggunakan hutang.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, penulis lebih sepakat bahwa untuk melaksanakan ibadah haji tidak dengan menggunakan dana utang. Atau dengan melalui cara mengikuti arisan haji, yang tetap saja merupakan utang. Walaupun pendapat yang membolehkan memberikan beberapa pengelucualian, tapi pengecualian tersebut sangat tidak terjamin di masa depannya. Misalnya, diperbolehkan dengan dana utang selama ia memiliki keyakinan akan melunasi utangnya. Keyakinan tersebut tidak jelas karena musibah tidak dapat diprediksi datangnya. Bagaimana jika ia meninggal dunia pada saat melaksanakan ibadah haji? Tentu akan menjadi masalah bagi

keluarganya yang harus melunasi utang tersebut, sehingga membawa *mudharat* bagi keluarganya.

Juga unsur *gharar* yang telah jelas, seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang ketidakjelasan waktu penyerahan, walaupun para peserta telah rela sama rela dengan mekanisme undian dimana semua peserta pasti berharap mendapat giliran pada saat undian dilaksanakan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوهُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah (2): 42)

Haji yang dilaksanakan hanya berbekal materi yang melimpah, ketiadaan ilmu, dan tidak adanya kepedulian sosial tidak akan mampu mewujudkan kemabruran haji bagi seseorang. Haji yang mabrur adalah haji yang mampu mewujudkan kesadaran nilai-nilai yuridis, nilai-nilai sosial dan kepedulian pada masyarakat, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Dalam hal mengerjakan ibadah haji para ulama telah memberikan keterangan-keterangan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ketika syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, maka haji tidak wajib baginya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban peserta jika terjadi perubahan ONH atau BPIH ialah sebagai berikut. Hak peserta ialah tetap sama yakni berangkat haji, walaupun terjadi perubahan ONH atau BPIH. Sedang kewajibannya ialah tetap melunasi pembayaran iuran yang tersisa dan ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH.

2. Tanggung jawab bandar jika salah satu atau beberapa peserta arisan melakukan wanprestasi ialah tetap melakukan kewajibannya untuk menagih peserta tersebut secara maksimal. Namun jika yang bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka pihak penyelenggara atau bandar dapat menerapkan sanksi berupa pengeluaran peserta tanpa pengembalian uang atau ikut bersama-sama peserta yang lain yang merasa dirugikan untuk menuntut peserta tersebut secara hukum.
3. Arisan secara umum termasuk *muamalat* yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan sunnah secara langsung. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan arisan ini tidak menjadi haram. Namun dalam pelaksanaan arisan haji, tetap saja banyak para ulama yang berselisih pendapat tentang tafsiran mengenai *istitha'ah* atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena berangkat haji melalui dana arisan, merupakan dana utang. Pada dasarnya, seseorang berutang karena tidak mampu sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berangkat haji dengan sistem arisan, tidak memenuhi syarat wajib mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga gugurlah kewajibannya melaksanakan haji.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. PT Citra Media. Yogyakarta.

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

J.Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Alumni. Bandung.

J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta.

M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

M. Wuraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Misbah-Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta

Muhammad Ibrahim Jannati. 2007. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*. Cahaya. Jakarta.

Munir, Fuady. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nur Syamsuddin. 2009. *Fiqh*. Dirjen Pendidikn Agama Islam. Jakarta

R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.

Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.

Sulaiman Rasjid. 2010. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensima. Jakarta.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah – Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Situs/web:

<http://id.wikipedia.org/wiki/arisan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14407/tanggung-jawab-bandar-arisan-dari-kacamata-hukum>

<http://laely-widjajati.blogspot.com>

<http://www.negarahukum.com//perjanjian-arisan>

<http://infohaji.8m.com>

<http://www.perencanakeuangan.com//untung-rugi-arisan>

moslemsunnah.wordpress.com

<http://sujarman81.wordpress.com/tag/asas-asas-hukum/>

notarissby.blogspot.com/

<http://digilib.uin-suka.ac.id/4021/>

<http://shalahuddinhamid.blogspot.com/2009/11/pandangan-kyai-ali-mustafa-yaqub.html>